

Daftar Pustaka

- Agustang, (2017) *Analisis Formulasi Kebijakan (studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD tahun Kab. Wajo)*. Uin Alauddin Makassar tahun 2017
- Alaslan, A. (2021). *formulasi Kebijakan Publik : Studi Relokasi Pasar*. Banyumas, Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Anggali, B. , Ichlasul A. Dan Rusmul M, K, (2019) Negosiasi Kepentingan dalam perumusan RPJMD DIY 2017-2022 dalam kerangka *Advokasi Coalition Framework*. Jurnal Borneo Administrator. Vol 12 No. 1 Hal. 81-98.
- Anggara, S. (2014) *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung
- Antik, B. (2016). Formulasi Kebijakan pemerintah tentang pembeentukan badan usaha milik daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, II(2), 220-238..
- Beritasulsel.Com, (2020). Malu Alasan Pemkab One Bangun Tower 10 Lantai <http://Berita-Sulsel.Com/2020/01/02/Malu-Alasan-Pemkab-Bone-Bangun-Tower-10-Lantai/> Diakses Pada Tanggal 02 Januari 2020.
- Bonekab.Bps.Go.Id, (2020). Indikator Kemiskinan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018. <https://Bonekab.Bps.Go.Id/Dynamictable/2020/01/09/61/Indikator-Kemiskinan-Kabupaten-Bone-2013-2018.Html> Akses Pada Tanggal 09 Januari 2020.
- Bonekab.Bps.Go.Id. (2020). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bone Tahun 2010-2018. <https://Bonekab.Bps.Go.Id/Dynamictable/2020/01/08/42/Indeks-Pembangunan-Manusia-Ipm-Kabupaten-Bone-2010-2018.Html> Diakses Pada Tanggal 08 Januari 2020.
- Bonepos.Com (2020). Kesimpulan Muserembang Bone 2021 Masyarakat Butuh Jalan Mulus <https://Www.Bonepos.Com/2020/03/13/Kesimpulan-Musrenbang-Bone-2021-Masyarakat-Butuh-Jalan-Mulus> Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2020
- Bugispos.Com, (2020). Polemik Pembangunan Tower 10 Lantai Di Bone <https://Bugispos.Com/2020/01/18/Polemik-Pembangunan-Tower-10-Lantai-Di-Bone/> Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2020
- Budi & Winarno. (2012). *kebijakan Publik, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta.
- Creswell, J (1998). *Research Design : Qualitative and Quantitative Approach* . Thousand Oaks : Sage Publications
- Creswell, J, (2007) *Qualitative Inquiry and Research design : chosing among five Approaches*. Thousand Oaks; Sage.
- Dunn, W (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

- Duverger, M. (2003). *Sosiologi politik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Erani, A. Y. (2009). *Ekonomi Politik : Kajian teoritis dan analisis empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haripin, M. (2013). *Reformasi Sektor Keamanan Pasca Orde Baru : Melacak Pandangan dan Komunikasi Advokasi Masyarakat Sipil*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Howlett, M. & Ramesh, M. (1995). *Studying public policy : policy cycles and policy subsystems*. New York : Oxford University Press
- Herzon, Y., (2011). *Politik Anggaran : Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Belanja Langsung SKPD Dalam Penyusunan APBD 2011 Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi*. Tesis Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Lindblom, C. (1984). *The Policy Making Process* (Vol. 2). USA, Yale .
- Madani, M. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Miles, & Huberman (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L.,J. (2009) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muslimin, L. (2020). *Formulasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Energi Terbarukan*. Yogyakarta.
- Muhammad, F. (2019). *Kepentingan Politik dan Representasi Kepentingan Publik (Studi Tentang Kepentingan Politik Otoritas Anggaran dalam Pembahasan APBD Kabupaten Pengandaran Tahun 2016*. Yogyakarta.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, R (2015). *Policy Making: “Mengubah negara menjadi negara berpartisipasi”* Jakarta; Alex Media Komputindo, H. 53.
- Nurhidayanti, S. (2013). *Proses Perumusan Kebijakan Pertambangan Di Kabupaten Sumbawa. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 17(1), 61.
- Oatley, T. (2012) *International Political Economy*. 5th edn. Boston: Pearson Education. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
- Patotori. (2018). *Relasi Eksekutif dalam pembahasan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Sleman Tahun 2015*. Yogyakarta.
- Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman RKPD Tahun 2021
- Pena Inspirasi https://www.youtube.com/watch?v=fr6YMj7U5g0&ab_channel=PenaInspirasi

- Praktino, D. (2004). *Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah*, Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.
- Praktino. (2008). *Manejemen Jaringan Dalam Persepektif Strukturasi*. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 12(1), 1-9.
- Pritasari, L. A. (2019). Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan : studi kasus kebijakan relokasi tambak udang. *Jurnal Borneo Administrator*, 179-198.
- Putra, F. (2012). Jebakan-Jebakan dalam Desentralisasi dan Partisipasi dalam hal Happy budi Febriasih "Partisipasi Warga dalam Pembangunan dan Demokrasi". *Avveroes Press*, (pp. 110-111). Malang.
- Qadri, M. (2018). *Dominasi Partai Golkar Psaca Reformasi*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rachbini, D. (2002). *Politik : Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- RKPD.Bone, 2021. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021
- Sandra, K., & Kathleen, M. (1989) *Methods krom The margin : Experience, Research, Social Change*. Toronto: Garmond Press.
- Setiawan, A. (2017). Politik anggaran : Kebijakan dan bagi hasil migas dalam APBD kabupaten Bojonegoro Tahun 2015. *Jurnal Politik Indonesia*, 2, 118-126.
- Subarsono, A. (2005). "Analisis kebijakan Publik : konsep, teori, Aplikasi" (Yogyakarta Pustaka Pelajar). H. 12-13
- Subarsono. (2009). *Anlisis Kebijakan publik : Konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Sulselsatu.Com (2019). Opini: Surat Terbuka Buat Yang Tercinta Di Gedung Eksekutif Dan Legislatif Kabupaten Bone. <https://Www.Sulselsatu.Com/2019/12/12/Opini/Opini-Surat-Terbuka-Buat-Yang-Tercinta-Di-Gedung-Eksekutif-Dan-Legislatif-Kabupaten-Bone.Html> Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2019.
- Taufiqqurahaman. (2014). *Kebijakan Publik ; Penedelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Peneyelengara Negara*. *Universitas Moestopo Bragama Pers*, (p. 42). Jakarta.
- Thoha, M. (2012) *Dimensi-dimensi prima ilmu administrasi negara*. Jakarta: Rineka Cipta
- undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Wahab, A. S. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Press UMM.

Wance, M. (2017). Politik Anggaran Eksekutif dan legislatif pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan 2015. *Jurnal Of Goverment- Jog*, II(2), 178-2

Wibawa, S. (2010). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wibowo, W. F. S, (2016) *Analisis Formulasi Kebijakan Publik (Konflik Antar Fraksi di DPRD dalam Kasus Penolakan Raperda Kota Surakarta Tentang Minuman keras)*. Skripsi UNS Surakarta 2016.